

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perdamaian merupakan tujuan serta impian seluruh masyarakat di dunia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sejak dahulu konflik selalu terjadi dengan berbagai macam penyebab yang berbeda. Karena dampaknya yang begitu mengerikan, masyarakat internasional kemudian mengutuk adanya peperangan sebab telah menimbulkan banyak korban yang tidak bersalah. Penjajahan dan peperangan merupakan tindakan yang dikecam oleh masyarakat dunia termasuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai institusi perdamaian global yang utama. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa Bangsa menekankan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dengan 5 pasalnya. Kelima Pasal ini secara eksplisit dan implisit bertentangan dan tidak membenarkan terjadinya perang dan penjajahan.

Dengan berbagai upaya negara untuk menjalin kerjasama, harapannya berbagai gesekan kepentingan dapat dijumpai dengan baik tanpa harus melibatkan adanya kekerasan. Namun sayangnya, di tengah perkembangan zaman yang terjadi, masih terdapat konflik dan peperangan yang terus terjadi. Salah satunya adalah konflik antara Israel dengan Palestina yang sudah berlangsung hampir 73 tahun terjadi. Konflik yang terus terjadi hingga saat ini belum dapat berakhir dan ditengahi dengan kerugian sangat besar mulai dari nyawa, materi, hingga generasi.

Konflik yang terjadi di antara Palestina dengan Israel bermula dari adanya perbedaan nasionalisme dari kedua pihak. Palestina dengan gagasan Arabnya dan Israel dengan kebangsaan Yahudi bergagasan Zionismenya menjadi alasan awal

terjadinya konflik keduanya (Scheweid, 2008). Israel terus menerus berusaha menguasai wilayah dari Palestina karena terdapat keyakinan bagi zionis bahwa bangsa Yahudi tidak akan selamat jika tidak bersatu dan berada pada wilayah yang sama dengan sebutan 'Tanah yang Dijanjikan' di Yerusalem. Wilayah inilah yang ditempati Palestina dan terus didesak oleh Israel agar bisa ditempati oleh penduduknya di kemudian hari (Amal, 2019). Pada tahun 1947 kemudian wilayah kedua negara ini dibagi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mencegah adanya demonstrasi lebih lanjut yang menghasilkan proporsi 46% wilayah untuk Palestina dan 54% wilayah untuk Israel meskipun jumlah penduduknya hanya 31,5% dari penduduk Palestina (Ashed, 2015). Konflik ini kemudian memuncak tatkala Israel dengan penduduk Yahudinya memproklamkan diri menjadi sebuah negara pada tahun 1948 (Susanto, 2021). Konflik ini kembali memanas pada tahun 1967 dengan adanya Perang Enam Hari dengan hasil Israel berhasil menduduki beberapa wilayah Palestina yang tidak tercantum dalam pembagian di tahun 1947. Karena adanya eskalasi konflik di antara kedua pihak, beberapa upaya damai diinisiasi seperti dengan adanya konferensi Jenewa pada tahun 1973 serta perjanjian Oslo yang mana gagal untuk meredam konflik kedua negara dibuktikan dengan terbunuhnya mantan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, pada tahun 1995. Amerika Serikat sebagai negara berpengaruh juga tidak absen mengambil peran dalam upaya damai kedua pihak. Di tahun 2013-2014 Amerika Serikat menginisiasi adanya perbincangan negosiasi untuk mencapai solusi kedua negara yang disebut dengan Peace Talk. Tetapi lagi-lagi upaya damai ini gagal yang menyebabkan ekspansi wilayah justru semakin gencar terjadi di wilayah Tepi Barat Palestina (BBC, 2014). Kegiatan

perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel ini menjadi salah satu kunci di dalam konflik kedua negara, terlebih penduduk Palestina yang memberikan tekanan menimbulkan adanya kekhawatiran tersendiri bagi penduduk Israel (Troen, 2011). Konflik ini masih terus menerus terjadi, bahkan di saat dunia sedang menaruh fokus yang begitu mendalam karena adanya pandemi covid-19 pada tahun 2021 terjadi konflik terbuka di antara kedua negara. Konflik ini meningkat intensitasnya setelah adanya protes dari penduduk Palestina di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa karena terancam digusur oleh otoritas Israel yang kemudian ditanggapi dengan kekerasan oleh petugas (DPR RI, 2021). Hingga saat ini, konflik kedua negara masih terus terjadi dan belum menemukan titik temu penyelesaiannya.

Adanya konflik di antara Palestina dengan Israel yang tidak kunjung usai menimbulkan berbagai kerugian terutama bagi masyarakat Palestina. Berdasarkan data yang dirilis oleh OCHA badan di bawah PBB, korban yang ditimbulkan dari adanya konflik di antara Israel dengan Palestina dalam jangka waktu tahun 2008 hingga 2022 menimbulkan kematian pada 6.015 warga Palestina serta mengakibatkan 136.347 warga Palestina terluka. Sedangkan dari sisi Israel sendiri terdapat 265 kematian warganya dan 5.884 warga terluka (OCHA, 2022). Tidak hanya dampak jangka pendek berupa jatuhnya korban saja yang dirasakan, namun konflik di antara kedua negara ini menimbulkan dampak yang berkelanjutan, salah satunya dengan terus bertambahnya pengungsi Palestina dengan berbagai kondisi memprihatinkan. Melihat data yang telah dirilis oleh UNRWA sebagai badan di bawah PBB yang berfokus pada pengungsi Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) hingga saat ini terdapat

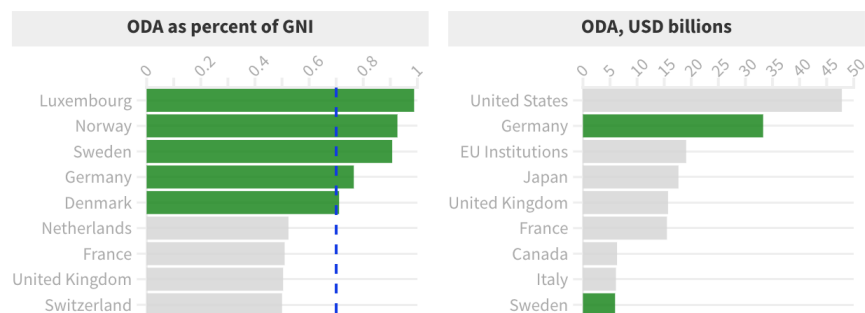
lebih dari 5 juta pengungsi Palestina dan sepertiga dari yang terdaftar (lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina) tinggal di 58 kamp pengungsian yang tersebar di berbagai tempat seperti Yodania, Lebanon, Republik Arab Syria, Jalur Gaza dan Tepi Barat, hingga Yerusalem Timur (UNRWA, 2022).

Besarnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat Palestina dengan kebutuhan hidup yang terbatas, membuat berbagai pihak mencoba memberikan sejumlah bantuan kepada Palestina. Mulai dari negara, organisasi internasional, hingga organisasi non pemerintahan. Berdasarkan data dari OECD yang merekap seluruh bantuan pembangunan berbagai aktor internasional, Jerman menjadi salah satu donor yang terbesar dalam pemberian bantuan luar negerinya. Jerman menempati urutan kedua terbesar berdasarkan besaran pemberiannya yang mencapai 33.27 miliar USD, tepat di bawah Amerika Serikat dan berhasil melampaui Jepang, Inggris, dan Prancis. Sedangkan berdasarkan persentase pendapatan nasional brutonya, Jerman menempati urutan keempat terbesar setelah Luxembourg, Norwegia, dan Swedia (OECD, 2021).

Jerman menjadi negara yang cukup spesial bagi Palestina, karena selain memberikan dana terbesar kedua menurut OECD, Jerman juga memberikan bantuannya secara komprehensif. Bantuan tidak hanya diberikan dalam cakupan bantuan kemanusiaan, tetapi melingkupi bantuan ekonomi pembangunan, diplomatis, dan politis. Menariknya, meskipun Jerman ini menjadi donor terbesar bagi Palestina, namun ternyata Palestina bukan merupakan pihak yang menjadi prioritas teratas kebijakan bantuan luar negeri Pemerintah Jerman. Berdasarkan data dari OECD pada tahun 2020, Palestina tidak masuk dalam 10 besar teratas

penerima bantuan pembangunan dari Jerman (OECD, 2021). Selain itu dalam hal bantuan kemanusiaan Palestina juga menempati urutan ke-18 yang penyerapan dananya sebesar 47% jauh di bawah Iraq sebesar 95%. Hal ini menjadi fenomena yang cukup menarik dimana Jerman sebagai negara yang terkita kental sejarahnya dengan Israel nyatanya juga memiliki kedekatan tersendiri dengan Palestina dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri ini.

Jerman juga menjadi negara donor yang cukup menonjol dalam pemberian bantuan luar negeri secara langsungnya. Pada tahun 2016, berdasarkan jumlah, Jerman menjadi negara terbesar kedua sebagai donor dalam bantuan pembangunan sebesar 24.67 miliar USD, setelah Amerika Serikat yang menggelontorkan dana sebanyak 33.59 miliar USD dan kemudian diikuti oleh Inggris, Jepang, dan Perancis. Meskipun begitu, berdasarkan persentase GNI pada tahun 2016 Jerman baru saja bisa mencapai target dari OECD yakni 0.70% menempati urutan kelima di bawah Norwegia, Luxemburg, Swedia, dan Denmark (OECD, 2017).



**Grafik 1.1** Official Development Assistance (ODA) in 2022, by members of the DAC

*Source: The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022*

Pada tahun 2021, Jerman masih tetap berhasil menempati posisi sebagai negara terbesar kedua sebagai donor dalam bantuan pembangunan sebesar 33.27 miliar

USD tepat di bawah Amerika Serikat yang memberikan bantuan sejumlah 47.8 miliar USD, serta berada di atas Uni Eropa, Jepang, dan Inggris (OECD, 2021). Hal ini yang menjadikan Jerman sebagai aktor yang cukup menonjol dalam pemberian bantuan luar negeri terhadap Palestina, baik dari persentase GNI maupun dari jumlah bantuan yang diberikan.

Jerman juga menyalurkannya melalui organisasi internasional, salah satunya UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Jerman menjadi donor terbesar bagi organisasi di bawah naungan PBB untuk menangani permasalahan pengungsi Palestina. Berikut adalah data terkait 5 donor teratas yang memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina berdasarkan data dari UNRWA pada 31 Desember 2021 (in USD) (UNRWA, 2021):

**Tabel 1.1** Top 20 Donors 2021 overall Ranking

No.	Donor	Programme Budget	Non-Programme Budget	Total
1.	USA	169,202,801	169,197,199	338,400,000
2.	Germany	38,411,394	138,568,416	176,979,810
3.	EU	104,651,163	13,002,204	117,653,367
4.	Sweden	48,609,333	5,630,676	54,240,009
5.	Japan	12,965,816	37,544,695	50,510,511

*Source: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 2021*

Melalui data pada tabel 1, dapat terlihat bahwasanya banyak negara yang memberikan support dana terhadap Palestina dengan jumlah yang tidak sedikit. Jerman menjadi negara yang cukup dominan dalam memberikan bantuan kepada Palestina. Tercatat Jerman menjadi negara donor terbesar kedua bagi Palestina setelah Amerika Serikat sebagai negara pendonor terbesar. Jerman menjadi negara yang membantu Palestina sejak lama. Hubungan telah dimulai sejak awal tahun 1980an, dimana Jerman mengeluarkan lebih dari 1,2 miliar euro untuk proyek bilateral dengan Palestina sebagai upaya kerjasama pembangunan negara tersebut.

Berdasarkan informasi yang diberikan di dalam laman resmi Pemerintah Federal Jerman, negara ini telah membuat satu badan khusus yang bertugas mengintensifkan hubungan kerjasama Jerman dan Palestina mulai dari aspek ekonomi, pembangunan, hingga pendidikan. Berbeda dari pola bantuan sebelumnya yang hanya berfokus pada bantuan berupa pendanaan, Badan ini dinamakan dengan German-Palestinian Steering Committee yang mulai berjalan di tahun 2010 dan mengadakan pertemuan rutin dua tahunan. Pada tahun yang sama pula, Jerman mendukung adanya pengembangan terhadap Otoritas Palestina dengan mengadakan kegiatan semacam training yang diperuntukkan petugas polisi Palestina. Bantuan ini menjadi komite pertama yang dibuat oleh negara di dunia untuk mendukung adanya persiapan Palestina dalam hal kebutuhan struktural sebuah pemerintahan. Sehingga periode tahun 2010 menjadi momen yang cukup penting bagi hubungan kedua negara.

Tidak hanya itu, bantuan juga terus diberikan oleh Jerman kepada Palestina. Melalui laman yang sama diinformasikan bahwasanya pada tahun 2017 Jerman juga menambahkan focus bantuannya ke ranah manajemen air dan sanitasi di area Gaza Strip. Di tahun 2020 Jerman menyediakan bantuan kemanusiaan kepada Palestina dengan total dana sebesar 193 juta euro yang meliputi pendanaan kerjasama pembangunan, bantuan kemanusiaan, stabilisasi, peacebuilding, budaya, dan juga edukasi. Di tahun 2021 pemerintah Jerman mengeluarkan lebih dari 10 juta euro untuk program pertukaran budaya dan edukasi dengan Palestina. Dalam memberikan bantuan ini, Jerman juga bekerjasama dengan pihak-pihak yang

lainnya mulai dari UN, UNRWA, EU, World Bank dan berbagai negara yang lainnya (German Federal Foreign Office, 2021).

Hubungan spesial antara Jerman dengan Palestina juga terlihat dari pernyataan Pemerintah Federal Jerman. Pada tahun 2022, Jerman melalui laman resmi Federal Foreign Office menyatakan bahwa Jerman mendukung adanya pembangunan untuk masa depan Negara Palestina sebagai bagian dari adanya upaya pencapaian solusi dua negara yang berkonflik. Jerman telah berkomitmen untuk mempromosikan stabilisasi salah satunya dengan membantu mempersiapkan polisi sipil Palestina (German Federal Foreign Office, 2022).

Meskipun Jerman secara konsisten terus memberikan bantuan kepada Palestina sedari tahun 1980, namun disisi lain ia juga memiliki hubungan yang cukup spesial dengan Israel. Sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa kedua negara memiliki sejarah kelam pada saat peristiwa “The Shoah”, yakni genosida terhadap warga Yahudi di Jerman yang memakan korban mencapai 6 juta jiwa. Adanya peristiwa ini membuat munculnya rasa tanggung jawab Jerman dalam menebus dosa lamanya. Oleh karena itu, dibentuklah hubungan diplomatik di antara kedua negara yang mulai terjalin 12 Mei 1965. Tanggung jawab Jerman juga dibuktikan dengan adanya pemenuhan terhadap Perjanjian Luxemburg tahun 1952 dengan membayarkan 74 miliar euro dan 29 miliar euro yang telah dibayarkan kepada para korban kejahatan Nazi yang tinggal di Israel. Hubungan keduanya terus terjalin dan semakin bertumbuh seiring berjalannya waktu hingga saat ini. Bahkan, Jerman telah menjadi partner ekonomi yang penting bagi Israel, dimana keduanya terlibat perdagangan bilateral yang berdasarkan data tahun 2020 telah



menghasilkan keuntungan hingga 6.6 miliar USD (Republic Federation of German, 2021).

Adanya konsistensi bantuan dari Jerman kepada Palestina kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan. Terlebih jika melihat waktu pemberian bantuan yang tidak singkat melainkan telah melalui 40 tahun jalinan hubungan kerjasama. Hal inilah yang menjadikan permasalahan ini menarik penulis untuk menganalisisnya lebih lanjut, terutama setelah dibentuknya German-Palestinian Steering Committee di tahun 2010 hingga 2022. Timbul pertanyaan terkait alasan dari bantuan Jerman yang telah konsisten dilakukan selama tahun periode tahun 2010 hingga 2022 serta faktor pendorong pemberian bantuan yang tidak sedikit bagi masyarakat Palestina. Apakah kemudian ada kepentingan terselubung yang membuat Jerman memutuskan memberikan bantuan kepada Palestina serta adakah keuntungan yang diharapkan Jerman dengan memberikan bantuan kepada mereka.

Topik ini menarik untuk diambil karena melihat waktu pemberian bantuan luar negeri yang tidak sebentar melainkan telah melalui waktu yang lama yakni selama 40 tahun hingga saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait motif serta alasan Jerman dalam memberikan bantuan, karena seperti yang diketahui Jerman juga sedang menjaga serta meningkatkan hubungan baiknya dengan Israel (pihak yang berkonflik dengan Palestina). Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ini penulis mencoba membawakan alat analisis berupa teori utilitarianisme dalam ranah bantuan luar negeri yang berfokus pada pembahasan konsekuensi paling menguntungkan bagi pihak donor karena hingga saat ini belum ada yang mencoba mengangkat topik serupa dengan teori ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Mengapa Jerman secara konsisten memberikan bantuan kepada Palestina sejak tahun 2010 hingga 2022 di tengah kedekatannya dengan Israel?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jerman kepada Palestina sejak tahun 2010 hingga tahun 2022.
2. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengungkap alasan di balik 12 tahun konsistensi bantuan Jerman kepada Palestina sejak tahun 2010 hingga 2022 di tengah konflik yang terjadi dengan Israel.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a) Kegunaan akademis**

- (1) Memberikan pengetahuan mengenai alasan di balik 10 tahun konsistensi bantuan Jerman terhadap Palestina sejak tahun 2010.
- (2) Mengisi kekosongan literatur terkait kepentingan negara terhadap kebijakan luar negeri suatu negara.
- (3) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi yang membutuhkan dan menambah pengetahuan mengenai kebijakan kerjasama Jerman.

### **b) Kegunaan praktis**

- (1) Penulisan karya diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai alasan di balik Konsistensi 10 tahun bantuan Jerman kepada Palestina dan kaitannya dengan utilitas maksimum.

3. Karya ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi yang membutuhkan terutama bagi yang ingin menambah pengetahuannya mengenai alasan dibalik Konsistensi 10 tahun bantuan Jerman kepada Palestina dan kaitannya dengan utilitas maksimum.

### **1.5 Kerangka Teori**

Negara menjadi aktor penting dalam dinamika kehidupan Internasional yang terdiri atas tujuan dan nilai yang ingin dicapai. Tujuan bersama inilah yang membuat setiap negara berdiri atas kepentingannya. Kepentingan suatu negara kemudian disebut sebagai kepentingan nasional. Arry Bainus dan Juanita Budi Rachman dalam jurnalnya mengatakan bahwasanya kepentingan nasional merupakan tujuan atau ambisi negara yang mencakup berbagai aspek dan sangat erat kaitannya dengan power atau kekuasaan negara. Pencapaian kepentingan ini kemudian dilakukan dalam beberapa upaya salah satunya membangun sebuah hubungan dengan negara lainnya. Maka dari itu Arry Bainus dan Juanita Budi Rachman mengatakan bahwasanya Hubungan Internasional menjadi instrumen yang cukup penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara (Bainus & Rachman., 2018). Kepentingan nasional suatu negara inilah yang kemudian direfleksikan menjadi kebijakan dalam berhubungan dengan aktor internasional agar tujuan negara dapat dicapai di skala global. Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara pastinya ditentukan oleh beberapa faktor. Selain dipengaruhi oleh faktor kepentingan nasional atau domestic, besar kemungkinannya kebijakan luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar negara tersebut.

Salah satu bentuk dari kebijakan luar negeri adalah keputusan suatu negara untuk memberikan bantuan luar negeri pada negara lainnya. Hal ini tentunya didorong oleh beberapa faktor yang kemudian dikuak oleh berbagai paradigma sebagai salah satu alat analisisnya. Dalam penelitian ini, penulis tidak membawakan teori-teori besar yang digunakan di dalam penelitian biasanya, seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Merujuk kepada topik utama yang dibawa adalah terkait dengan bantuan luar negeri atau *foreign aid*, maka penulis memutuskan menggunakan teori-teori di dalam bantuan luar negeri. Tujuannya agar teori ini dapat membantu penulis mengupas dan menjawab rumusan masalah secara lebih tuntas. Pemberian *foreign aid* sudah menjadi salah satu kebijakan yang seringkali dilakukan oleh negara maupun aktor negara lainnya semenjak perang dunia 2 berakhir. Bentuk bantuan yang diberikan pun bisa beragam, mulai dari bantuan kemanusiaan, bantuan dana, hingga bantuan militer. Meskipun begitu, dari setiap bantuan yang diberikan belum tentu mencapai keberhasilan. Terkadang bantuan luar negeri yang diberikan justru membuat dampak negatif pada negara yang diberi bantuan sehingga bantuan tersebut disebut *ineffective*. Dambisa Moyo adalah salah satu tokoh yang menyuarakan dengan lantang terkait dengan hal ini. Menurut Moyo, pemberian bantuan luar negeri bisa memberikan efek mematikan dengan timbulnya ketergantungan serta kemalasan ekonomi dari negara penerima bantuan (Moyo, 2009).

Adanya ketidakefektifan serta kegagalan dari bantuan luar negeri menimbulkan adanya pandangan pesimis, seperti yang dikemukakan oleh beberapa paradigma. Realis misalnya memandang bahwasanya pemberian *foreign aid*

dilakukan hanya semata-mata untuk melindungi kepentingan yang dimiliki oleh negara pembuatnya. Sedangkan dalam pandangan Liberalisme, bantuan luar negeri dilakukan dengan motif utama untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, dengan premis utama demokrasi sebagai determinan dari perdamaian dunia. Meskipun begitu, tidak semua paradigma memandang bantuan luar negeri menjadi suatu hal yang buruk, seperti motif kemanusiaan di balik bantuan luar negeri yang diberikan, walaupun memang alasan kemanusiaan ini juga masih menuai pro-kontra dan terus menjadi pertanyaan terkait kebenarannya.

Salah satu cara melihat motif baik dan buruk dari suatu bantuan luar negeri adalah dengan melihat aspek etika di balik adanya bantuan yang diberikan sebagai salah satu alat ukurnya. Menurut Jennelie Danielson dan Anna-maria Polasek di dalam tulisannya menyatakan terdapat 5 teori yang berkaitan dengan etika di dalam pemberian bantuan luar negeri (Danielsson J & Anna M.P., 2020). Kelima teori ini meliputi:

- a. Teori Konsekuensialisme (*consequentialism*): Teori ini berfokus pada penentuan kebenaran suatu tindakan secara moral dengan melihat konsekuensinya (Graafland & Bosma, 2013; Fitzpatrick, 2008).
- b. Teori Utilitarianisme (*utilitarianism*): Teori ini terkesan hampir sama dengan teori pertama namun menekankan pada konsekuensi yang paling baik (utilitasnya) bagi aktor memberi daripada yang lain (Graafland & Bosma, 2013; Hansson, 2009).

- c. Teori Etika Deontologi (*deontological ethics*): Penekanan utama pada tugas yang diemban seorang aktor sebagai determinan standar moral baik dan buruk suatu tindakan (Hansson, 2009).
- d. Teori Sosialisasi (*socialization*): Teori ini mencoba menghubungkan antara individu dengan media dimana keduanya kemudian saling mempengaruhi satu sama lain (Giddens & Sutton, 2013).
- e. Teori Pilihan Rasional (*rational-choice*): Tindakan seorang aktor merupakan tindakan paling rasional untuk mencapai tujuannya (Scott, 2000).

Pada penelitian yang ditulis kali ini, kelima teori yang berkaitan dengan etika bantuan luar negeri di atas tidak akan digunakan seluruhnya oleh peneliti, melainkan hanya akan menggunakan salah satunya. Penulis akan menggunakan utilitarianisme untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yakni terkait motif bantuan luar negeri Jerman terhadap Palestina yang disaat bersamaan juga berhubungan dengan Israel. Utilitarianisme digunakan untuk melihat apakah bantuan yang diberikan Jerman kepada Palestina memberikan konsekuensi terbaik untuk negaranya. Hal ini melihat adanya posisi Jerman yang berada di tengah kedekatannya pula dengan Israel membuat adanya keputusan pemberian bantuan luar negeri terhadap Palestina menjadi tidak rasional.

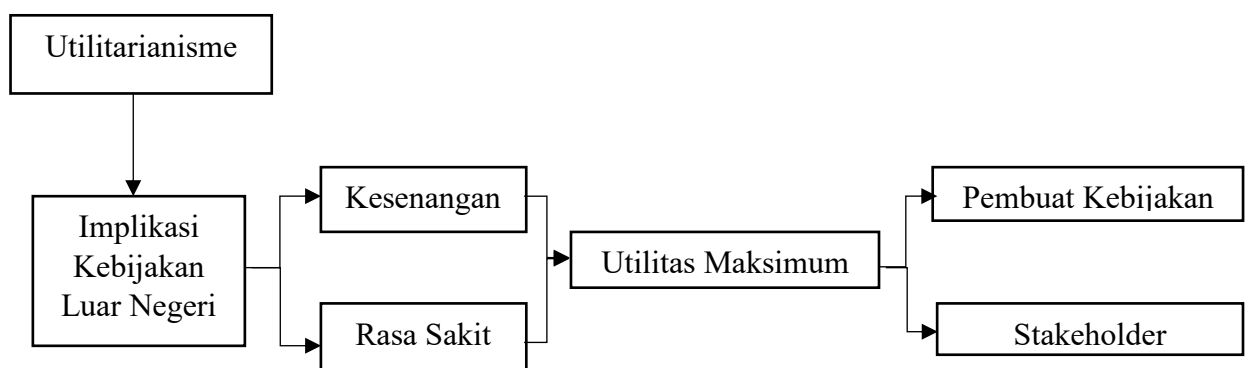
Teori Utilitarianisme pada dasarnya merupakan salah satu turunan dari teori konsekuensialisme. Teori yang berakar pada pemahaman filsafat kuno ini membawakan premis dasar bahwa setiap individu akan tertarik kepada kesenangan dan berusaha menghindari rasa sakit. Teori yang muncul pada abad ke 18 dan 19 ini berakar pada filsafat etika yang dibawakan oleh filsuf serta ekonom Inggris

pada saat itu. Teori ini pertama kali dibawakan oleh Jeremy Bentham yang kemudian diperkuat John Stuart Mill. Menurut Bentham, prinsip utilitas yang menyatakan bahwasanya suatu tindakan hanya boleh dilakukan jika membawa kebahagiaan dan utilitas paling maksimal bagi orang-orang di sekitarnya. Salah satu hal yang cukup menonjol dalam paradigma ini adalah terkait dengan “etika pribadi” yang merupakan salah satu seni untuk mengatur tindakan dan dideterminasi oleh kebahagiaan agen tersebut (Bentham, 1998). Teori ini mencoba memberikan petunjuk bahwasanya seorang aktor harus bertindak untuk menghasilkan konsekuensi sebaik mungkin jika ia ragu atas apa yang seharusnya ia lakukan (West & Brian, 2005). Utilitarian mempercayai bahwasanya tindakan yang memiliki hasil terbaik untuk sebagian besar entitas adalah tindakan yang benar. Keyakinan ini kemudian lebih dikenal dengan kutipan “*greatest good for the greatest number*” (Harwood, 2003).

Teori Utilitarian telah mengalami berbagai perkembangan. Setelah Bentham dan Mill berhasil mempromosikan teori ini menjadi sesuatu yang terkemuka, muncul berbagai tulisan baru sebagai salah satu bentuk pengembangannya. Sidgwick contohnya, dengan membawakan pemikirannya dengan judul *Methods of Ethics* di tahun 1874. Di dalam tulisannya ia mencoba membawakan analisis yang cermat bahwasanya utilitarianisme adalah prinsip tindakan moral dari seorang aktor melalui pemeriksaan komparatif terhadap pemikiran egoism serta etika akal sehat. Tidak berhenti begitu saja, pada abad ke 20 terdapat modifikasi teori utilitarian yang dibawakan oleh GE Moore yang membawakan konsep hedonisme sebagai salah

satu hal yang merangsang seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip utilitasnya (Ni'am, 2008).

Teori utilitarianisme membawakan klaim fakta ilmiah di level yang mendasar bahwa kesenangan adalah kepentingan individu sedangkan adanya rasa sakit merupakan suatu hal yang melanggar kepentingan mereka. Didukung pula dengan hadirnya sistem *reward* dan *punishment*. Sebagai salah satu upaya untuk memperoleh kepuasan maksimal dan rasa sakit minimal maka setiap aktor harus melakukan berbagai kalkulasi untung rugi terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan (Bennett, 1995). Maka dari itu menurut Bentham teori utilitarianisme ini merupakan alat analisis yang bisa memecahkan kesulitan dan kebingungan yang tidak sesuai dengan rasionalitas akal sehat (Bentham, 1998).



**Bagan 1.1** Alur Berpikir Teori Utilitarianisme

Sebelum melanjutkan penelitian ini ke tahap analisis yang lebih serius, tinjauan pustaka atau *literature review* dilakukan guna mencari nuansa baru dari permasalahan yang diangkat. Terdapat beberapa penelitian yang mencoba mengangkat permasalahan yang serupa dan berdekatan terkait dengan kebijakan. Jerman terhadap Israel dan Palestina atas konflik yang telah lama berlangsung. Literatur pertama yang mengangkat topik terkait membawakan judul “*The Weight of History: Change and Continuity in Policy towards the Israeli-Palestinian*



*Conflict*” yang ditulis oleh Anne-Kathrin Kreft. Tulisan yang dipublikasikan pada tahun 2010 ini lebih berfokus kepada bagaimana Kebijakan Luar Negeri Jerman terhadap konflik antara Israel dan Palestina. Di dalam pembahasannya penulis mencoba menganalisis konsistensi kebijakan luar negeri Jerman menggunakan dua paradigma sekaligus, yakni realisme dan konstruktivisme. Berdasarkan temuannya melalui pandangan realisme, bahwa konsistensi kebijakan Jerman terhadap konflik dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan nasional setelah adanya peristiwa unifikasi. Selain itu berdasarkan analisis melalui perspektif konstruktivisme, kebijakan Jerman di dalam konflik kedua negara dipengaruhi oleh adanya norma “*philo-zionism*” pada para elit Jerman yang kemudian mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negerinya di saat bersamaan.

Topik serupa juga diangkat oleh peneliti Jerman yakni Von Markus Kaim dan Oliver W. Lembcke dengan judul “*The German Role in the Middle East: High Time for a Check Up*”. Tulisan yang dirilis pada tahun 2002 ini mencoba mengemukakan alasan di balik peran Jerman di Timur Tengah, termasuk dalam konflik antara Israel dengan Palestina. Menurut analisis penulis terdapat 2 faktor utama yang melatarbelakangi keterlibatan Jerman di kawasan ini. Yang pertama dipengaruhi oleh adanya tanggung jawab Jerman terhadap Israel dan perdamaian kawasan yang dilandasi oleh adanya sejarah serta standar moral. Sedangkan faktor yang kedua, berdasarkan perspektif realisme klasik, penulis menganalisa bahwa yang membuat Jerman memutuskan untuk memainkan peran lebih di kawasan ini adalah terkait dengan kepentingan ekonomi dan keamanannya. Hal ini berkaitan dengan efek samping keterlibatannya berupa akses masuk ke dalam pasar yang ada di kawasan

ini, pengamanan kepentingan sumber daya energi di timur tengah, pencegahan lonjakan pengungsi ke wilayah Jerman, serta mengurangi adanya dampak negatif dari konflik Israel dan Palestina.

Penelitian ketiga yang mencoba mengangkat topik ini ada di dalam buku yang berjudul *Germany and the Middle East Interests and Option* tahun 2002. Buku yang ditulis oleh Perthes Volker dan sekumpulan peneliti lain di dalamnya ini mencoba menganalisa terkait kepentingan Jerman di dalam hubungannya dengan kawasan Timur Tengah, termasuk dalam tujuan perdamaian. Menurut Volker, kepentingan Jerman di dalam upaya mewujudkan perdamaian di kawasan ini tidak hanya semata didorong adanya motif kemanusiaan saja, tetapi di sisi lain juga merefleksikan adanya hubungan spesial antara Jerman dengan Israel atas adanya kewajiban masa lalunya. Selain itu, keterlibatan Jerman juga tidak terlepas dari kepentingan Jerman untuk bisa memperbaiki serta membangun citra dan jejalin hubungan yang baik dengan negara-negara Arab. Dengan begitu, Jerman bisa lebih mudah mencapai kepentingan keamanan, ekonomi, dan energi negaranya di kawasan ini.

Penelitian keempat yang mengambil topik serupa adalah penelitian karya Anisa Amalia Soekarno pada tahun 2019 dengan judul “*United States’ Unwavering Support to Israel: Biased Foreign Policy in Israel - Palestine Conflict under President Donald Trump’s Administration (2016 - 2019)*”. Penelitian ini mencoba menguak bias yang terjadi di dalam kebijakan luar negeri Donald Trump pada konflik antara Israel dan Palestina menggunakan sudut pandang teori realisme neoklasik. Melalui penelitian ini, penulis berhasil membuktikan hipotesisnya bahwa bias yang tercipta ini dikarenakan terdapat faktor sistemik dan domestik

sebagai pendorong kebijakan luar negeri Trump. Faktor sistemik terdiri dari adanya upaya pencarian senjata pemusnah milik Iran dan keberadaan kelompok terorisme radikal di Timur Tengah. Sedangkan faktor domestiknya sendiri terdiri dari struktur domestik politik Amerika, lobi yang terjadi dengan Israel, dan Elit pemerintahan Trump.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan pada 4 penelitian sebelumnya, selanjutnya penulis ingin memberikan nuansa baru di dalam topik ini, atau yang biasa disebut sebagai *state of the art*. Jika penulis lain lebih memilih menaruh fokusnya kepada *foreign policy* secara luas, penulis di dalam penelitian kali ini akan berfokus kepada kebijakan pemberian bantuan luar negeri atau *foreign aids* sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Jerman untuk Palestina. Teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian yang telah ada. Penulis akan menggunakan teori utilitarianisme sebagai alat bantu menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian kali ini. Penulis akan berfokus pada alasan di luar aspek kemanusiaan, melainkan pada pertimbangan konsekuensi yang paling baik baik Jerman dalam berbagai aspek seperti terjaganya hubungan dengan Israel, terciptanya keterikatan dengan Palestina beserta negara-negara Timur Tengah lainnya, terciptanya citra baik Jerman baik di Kawasan Eropa maupun global. Dengan begitu, Jerman bisa lebih mudah mencapai keuntungan maksimal dan memuaskan kebutuhan banyak pihak yang ada.

## 1.6 Definisi Konseptual

### 1.6.1 Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*)

Menurut Valerie M. Hudson dan Christopher S. Vore dalam tulisannya mengenai “Foreign Policy Analysis Yesterday, Today, and Tomorrow” bahwasanya berbagai guncangan bisa saja mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, dimana salah satu contohnya adalah dalam prediksi perubahan besar dari akhir perang dingin atas berbagai teori hubungan internasional baru. Di dalam tulisannya Valerie dan Christopher juga mengatakan bahwasanya kebijakan luar negeri suatu negara juga turut didasari atas perilaku manusia baik secara individu ataupun kolektif. Perilaku yang diambil ini terlebih dahulu didasari oleh adanya keinginan, motivasi manusia dalam memberikan pengaruh dan membentuk suatu kepentingan di dunia. Kebijakan politik luar negeri suatu negara juga bisa saja berubah seiring perkembangan isu-isu global yang mempengaruhi sistem dunia seperti salah satunya adalah konflik antar dua negara. Terdapat beberapa agenda tersembunyi yang turut berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, diantaranya adalah kebutuhan dan kepentingan untuk mempertahankan suatu kelompok, kepentingan untuk melindungi dan memperluas kekuasaan, dan juga motivasi ideologis dari suatu kelompok maupun individu (Hudson & Vore, 1995). Kepentingan di dalam kebijakan luar negeri inilah yang kemudian biasa disebut dengan *national interest*.

Kepentingan nasional menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dilepaskan di dalam kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk di dalam pemberian bantuan luar negeri. Menurut Jemandu di dalam tulisannya, terdapat beberapa jenis

kepentingan nasional, mulai dari kepentingan yang sifatnya vital mendesak di keadaan darurat sehingga perlu adanya keputusan secepatnya dan ada pula kepentingan yang bersifat non-vital dimana hasil serta fungsinya dirasakan untuk waktu yang tidak singkat (Jemandu, 2008).

Konsep *national interest* salah satunya dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau. Menurut Morgenthau kepentingan nasional adalah salah satu determinan dalam perumusan kebijakan suatu negara yang kemudian dibagi ke dalam tiga poin utama yakni kepentingan terkait identitas fisik, perlindungan politik ekonomi, dan perlindungan terhadap budaya negaranya (Yani et al., 2017). Kepentingan nasional ini adalah serangkaian tujuan yang ingin dicapai serta dicitakan oleh suatu negara atau bangsanya secara keseluruhan (Rudy, 2002). Pendekatan yang dibawakan oleh Morgenthau ini menjadi salah satu paradigma yang cukup sering digunakan di dalam studi hubungan internasional, terutama setelah perang dunia kedua berakhir. Salah satu penggunaan pendekatan ini ada pada tinjauan pemimpin negara yang akan memutuskan adanya kebijakan yang bersifat kooperatif atau bahkan konfliktual. Hal ini dikarenakan kepentingan nasional menjadi unsur yang akan melindungi kebutuhan negara mulai dari pertahanan, militer, hingga kesejahteraan ekonomi suatu negara (Perwita & Yani, 2005).

### **1.6.2 Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)**

*Foreign aid* salah satu mekanisme dalam konsep kebijakan luar negeri yang sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat internasional. Menurut Richard Snyder yang merupakan seorang ahli politik berasal dari Amerika memahami konsep

*foreign policy* sebagai strategi yang dipilih oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai kepentingan mereka dengan aktor lainnya (Snyder, et al., 1954). Salah satu bentuk perwujudan kebijakan luar negeri adalah dengan adanya pemberian bantuan luar negeri. Di dalam tulisannya Sara Lengauer mengatakan bahwa *foreign aid* dimaknai sebagai salah satu instrumen dari aspek ekonomi yang biasa dilakukan oleh negara-negara maju dengan tujuan agar kepentingan luar negerinya dapat tercapai semenjak Perang Dunia II berakhir. Sara juga menjelaskan bahwasanya bantuan dapat berupa berbagai bentuk, seperti barang, uang, jasa, maupun bantuan pasukan militer. Bantuan biasanya diberikan atas beberapa alasan tujuan, seperti yang paling umum adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan di negara penerimanya (Lengauer, 2011). Definisi lainnya juga diberikan oleh Victoria Williams dalam tulisannya, yang mendefinisikan *foreign aid* sebagai proses perpindahan barang atau jasa dalam lingkup internasional dari suatu negara atau organisasi internasional ke aktor internasional lainnya. Victoria menjelaskan bahwasanya bantuan luar negeri diberikan dilatarbelakangi adanya kepentingan negara penerima atau penduduknya. Sedangkan bentuk bantuan luar negerinya dapat berupa komoditas, sumber daya, bantuan teknis ataupun pelatihan yang diberikan (Williams, 2018).

Bantuan luar negeri yang saat ini dikenal adalah dalam bentuk *Official Development Assistance* atau ODA, dimana bantuan ini ditujukan untuk promosi pertumbuhan suatu negara dan juga upaya untuk memberantas kemiskinan. Bantuan ini dibuat oleh Lembaga yang bernama *Development Assistance Committee* (DAC) yang merupakan Lembaga di bawah naungan OECD atau *Organization for*

*Economic Co-operation and Development* sedari tahun 1969. Sistem bantuan luar negeri ini hadir untuk menjadi alat ukur bagaimana bantuan tersebut diberikan dan diterima suatu negara (ODA, 2018).

### **1.6.3 Konsistensi (*Consistency*)**

Konsisten menurut KBBI merupakan sebuah tindakan yang bersifat konsisten. Kata yang mulai dikenal ada tahun 1570 ini diserap dari bahasa asing, yakni *consistent*. Melalui adanya tindakan konsisten ini, objek yang dikenai sifatnya tidak berubah-ubah, atau terjadi penetapan baik secara perbuatan atau hal yang lainnya (KBBI, 2023). Selain itu menurut kamus Oxford, konsisten diartikan sebagai sebuah perbuatan yang berulang dalam waktu ke waktu serta bersifat sama (Kamus Oxford, 2023). Menurut Kamus Cambridge, konsisten diartikan dengan lebih sederhana yakni merupakan sesuatu yang bersifat tetap serta tidak berubah (Kamus Cambridge, 2023). Menurut salah satu pakar kebahasaan Reza M Syarif, Konsisten diartikan sebagai suatu hal yang memiliki fokus pada satu aspek atau bidang tertentu dan tidak melakukan adanya pergeseran pada bidang yang lainnya (Prawiro, 2020).

Jika konsisten merupakan sifat dari suatu subjek, maka konsistensi merupakan kata kerjanya. Kata konsistensi itu sendiri diartikan oleh Arianto di dalam Leonard dan Supriati juga turut mengartikan kata ini dengan sudut pandang yang agak berbeda yakni sebagai sebuah keteguhan hati seorang aktor pada usaha ataupun tujuan yang ia miliki sebagai salah satu upaya pemenuhan target yang ia miliki. Konsistensi juga menurut Arianto identik dengan adanya alasan di baliknya. Maksudnya adalah, seseorang konsisten menjalani sesuatu itu di dasari oleh adanya

kesadaran atas adanya keinginan serta tujuan yang ia miliki (Leonard & Supriyati, 2015). Berdasarkan berbagai sumber di atas, maka dapat disarikan dan dimaknai bahwa konsistensi merupakan sebuah usaha seorang aktor untuk memenuhi dan mencapai tujuan serta targetnya dengan terus menerus dan dalam jangka waktu yang tidak singkat sebagai representasi dari tujuan serta motif tindakannya.

## **1.7 Definisi Operasional**

### **1.7.1 Kebijakan Luar Negeri Jerman (*German Foreign Policy*)**

Setiap negara pastinya memiliki keputusan yang berbeda-beda di dalam setiap masalah. Kondisi yang kompleks memungkinkan suatu negara memilih untuk membuat suatu keputusan yang tidak sederhana pula. Salah satunya ada pada kondisi di dalam hubungan internasional. Berbagai permasalahan di dunia membuat negara terkadang harus membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan negara lain dan aktor di level global lainnya. Hal ini yang kemudian dikenal sebagai kebijakan luar negeri.

Jerman sebagai salah satu negara terkemuka di dunia juga tidak lepas dari pembuatan suatu kebijakan. Berbagai sejarah telah membentuk hubungan Jerman dengan negara lainnya. Israel menjadi negara yang sampai saat ini berhubungan baik dengan Jerman atas adanya sejarah kelam di antara keduanya. Kekuasaan Rezim Nazi pada saat berkuasa membuat trauma tersendiri melihat adanya pembantaian terhadap jutaan orang Yahudi. Peristiwa Holocaust inilah yang membentuk adanya tanggung jawab masa lalu Jerman terhadap Israel hingga saat ini. Rasa tanggung jawab ini kemudian direfleksikan ke dalam kebijakan luar negeri Jerman dengan berkontribusi membantu membangun Israel dan mendukung Israel



menjadi sebuah negara yang sah serta diakui oleh masyarakat Internasional (Zayad & Rainer, 2019).

Namun, lagi-lagi kompleksnya hubungan internasional membuat kebijakan luar negeri suatu negara tidak sesederhana kelihatannya. Jerman yang merupakan anggota dari Uni Eropa dan Persatuan Bangsa Bangsa juga membuat sebuah kebijakan yang merepresentasikannya sebagai agen perdamaian. Hal ini membuat Jerman tidak bisa menutup mata dari konflik yang terjadi di antara Israel dan Palestina. Maka dari itu, Jerman kemudian membuat kebijakan untuk memberikan bantuan luar negeri atau *foreign aid* terhadap palestina sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kemanusiaannya. Tentunya bantuan ini tidak terlepas dari berbagai perkiraan kepentingan yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa penulis yang mengemukakan kepentingan di dalam bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jerman kepada Palestina dari tahun 2010 hingga saat ini. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Anne-Kathrin Kreft yang menganalisis bahwasanya kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Jerman secara konsisten terhadap Palestina ini didasari oleh adanya kepentingan nasionalnya serta dipengaruhi pula oleh adanya norma "*philo-zionism*" yang dianut oleh para elit Jerman.

### **1.7.2 Bantuan Luar Negeri Jerman (*German Foreign Aid*)**

Bantuan luar negeri telah menjadi salah satu perwujudan dari kebijakan luar negeri suatu negara sejak lama. Hal ini juga turut dilakukan oleh Jerman sebagai salah satu negara terpadang. Jerman memberikan bantuan luar negeri kepada banyak negara dan Palestina menjadi negara yang secara konsisten menerima bantuan dari Jerman. Hingga saat ini, Jerman telah menjadi donor kedua terbesar

bagi Palestina setelah Amerika Serikat bersama dengan UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) (UNRWA, 2021).

Bantuan luar negeri yang diberikan Jerman kepada Palestina juga beragam. Hal ini dikemukakan langsung oleh Pemerintah Jerman di dalam laman resmi pemerintahannya. Bantuan dilakukan mulai dari tahun 2010 yakni bantuan untuk membangun efektifitas di dalam pasukan kepolisian Palestina melalui adanya fasilitas komunikasi dengan penduduk lokal. Selain bantuan keamanan, Jerman juga secara massif memberikan pendampingan kemanusiaan atau *humanitarian assistance*. Bahkan di masa pandemi, Jerman tidak berhenti melakukan bantuan kemanusiaannya terhadap Palestina. Di tahun 2010 diketahui Jerman telah menyumbangkan 87,2 juta euro untuk pendampingan kemanusiaan terkhusus di jalur Gaza dan Tepi Barat Palestina. Bantuan kemanusiaannya berfokus kepada perawatan kesehatan dan dukungan psikososial.

Jerman tidak hanya memberikan bantuan dalam aspek kemanusiaan saja, tetapi bantuan juga meliputi aspek budaya dan kebijakan pendidikan. Jerman menyediakan lebih dari 10 juta euro untuk program pertukaran pendidikan dan budaya antara Jerman dan Palestina di tahun 2021. Bantuannya termasuk dengan adanya pembuatan dua sekolah Jerman di Palestina. Pendanaan yang diberikan Jerman juga dialokasikan untuk program-program penguatan masyarakat sipil dan identitas kebudayaan rakyat Palestina (German Federal Foreign Office, 2021).

Dalam hal bantuan yang berkelanjutan, Jerman juga hadir sebagai partner bilateral bagi Palestina melalui 2 program, yakni *development cooperation* dan

*transnational development assistance*. Upaya ini juga diperkuat dengan kontribusi Jerman pada Uni Eropa, Persatuan Bangsa Bangsa serta program pembangunan yang dibuat oleh Bank Dunia. Jerman mengatakan bahwa prioritas utama dari kerjasama pembangunan yang dilakukannya dengan Palestina bertujuan untuk mempromosikan pemerintahan yang baik dan memperkuat masyarakat sipil serta ketahanan ekonomi Palestina (German Federal Foreign Office, 2021).

### **1.7.3 Konsistensi Jerman (*German Consistency*)**

Jerman merupakan salah satu aktor di dalam hubungan internasional. Hal ini tidak lain menjadikan Jerman sebagai objek yang memiliki sifat dan melakukan tindakan tertentu. Di dalam dinamika hubungan internasional, Jerman sebagai negara juga turut memiliki adanya nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapainya, salah satunya di dalam hal ini adalah adanya prinsipnya sebagai aktor perdamaian untuk mewujudkan tujuan bersama yakni perdamaian dunia. Adanya tujuan ini membuat Jerman secara sadar berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dunia dengan adanya pemberian bantuan luar negeri kepada berbagai pihak yang membutuhkan, salah satunya Palestina.

Jerman memberikan bantuan kepada palestina sejak tahun 1980-an. Meskipun begitu hubungan bilateral yang erat mulai dijalin dari tahun 2010 dengan adanya pembentukan *German-Palestinian Steering Committee*. Mulai dari tahun tersebut, Jerman secara terus menerus memberikan bantuannya kepada Palestina. Setiap tahunnya Jerman menggelontorkan jutaan hingga miliar euro dalam bantuan pembangunan ekonomi Palestina (BMZ, 2023). Tidak berhenti disitu, Jerman juga memberikan berbagai bantuan kemanusiaan setiap tahunnya kepada Palestina, baik

dalam bentuk dana maupun program-program kemanusiaan di berbagai sektor yang menjadi kebutuhan Palestina. Pertemuan keduanya juga secara rutin dilakukan setiap dua tahun sekali untuk membicarakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berkonflik yakni Palestina dan Israel (German Federal Foreign Office, 2023). Melalui pemberian bantuan setiap tahunnya, adanya pertemuan rutin keduanya, serta kesadaran atas tujuan yang ingin dicapai, dapat diartikan Jerman secara konsisten memberikan bantuan luar negerinya kepada Palestina atas adanya tujuan dan kepentingan nasionalnya sebagai seorang aktor Hubungan Internasional.

### **1.8 Argumen Penelitian (Hipotesis)**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan juga konsep-konsep yang ada, penulis berhipotesis bahwa alasan 10 tahun konsistensi bantuan Jerman terhadap Palestina sejak tahun 2010 di tengah kedekatannya dengan Israel adalah karena dipengaruhi oleh pertimbangan adanya utilitas paling baik bagi Jerman sebagai negara donor. Kebijakan bantuan luar negeri bagi Palestina merupakan keputusan yang memiliki konsekuensi paling baik bagi Jerman dalam berbagai aspek seperti terjaganya hubungan dengan Israel, terciptanya keterikatan dengan Palestina beserta negara-negara Timur Tengah lainnya, terciptanya citra baik Jerman baik di Kawasan Eropa maupun global.

### **1.9 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatori dan untuk lebih detailnya akan dijelaskan melalui pembahasan di bawah ini:

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Bogdan dan Taylor mengartikan penelitian kualitatif sebagai sebuah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Nugrahani, 2014). Data dari penelitian kualitatif yang dilakukan tidak dihasilkan dari prosedur statistik maupun proses perhitungan lainnya. Metode penelitian ini ditentukan oleh sifat fenomenologis yang menekankan pada penghayatan atau *verstehen* (Gunawan, 2013). Metode kualitatif sendiri adalah desain riset yang mencoba untuk memahami suatu masalah dan makna dibalikny secara mendalam berdasarkan suatu fenomena yang terjadi. Metode kualitatif ini cocok digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini karena dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan hubungan sebab-akibat atau kausalitas. Dengan metode kualitatif ini diharapkan peneliti mampu menjawab rumusan masalah tersebut secara komprehensif dan dapat menguak makna di balikny secara mendalam.

### **1.9.2 Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Jerman sebagai salah satu Aktor Internasional yang mengambil kebijakan luar negerinya untuk memberikan bantuan kepada Palestina secara konsisten selama 10 tahun dan di sisi lain juga sedang berusaha memenuhi tanggung jawab masa lalunya dengan Israel.

### **1.9.3 Jenis Data**

Guna memperkuat hipotesis penelitian ini, maka penulis menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Menurut Hox & Boeije dalam karyanya *Data Collection, Primary vs. Secondary*, data yang diperoleh langsung

oleh pelaku penelitian (peneliti) ketika sedang melakukan penelitian sesuai dengan riset dan metodologi merupakan pengertian data primer sedangkan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber yang ada dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan merupakan definisi data sekunder (Hox & Boeijs, 2005). Hasil wawancara dengan informan merupakan contoh dari data primer. Sedangkan data yang didapatkan dari internet atau studi pustaka merupakan contoh data sekunder.

#### **1.9.4 Sumber Data**

Untuk memperoleh data-data yang kredibel, akan diperoleh data yang berasal dari situs-situs resmi Pemerintah Federal Jerman terutama pada bidang yang berkaitan seperti Kerjasama dan Bantuan Luar Negeri. Data juga akan diambil dari hasil pidato aktor-aktor penting Jerman dalam press conference dan momen penting lainnya. Selain itu, peneliti juga akan mengambil data yang bersumber dari situs-situs Lembaga non-pemerintahan seperti milik UN dan UNRWA yang berkewenangan memberikan tanggapan di dalam konsistensi kerjasama yang dilakukan. Sumber pendukung lainnya akan diambil dari media massa atau surat kabar seperti CNN, BBC, CNBC, dan lain sebagainya. Sumber-sumber penelitian sebelumnya juga akan dijadikan sebagai salah satu referensi dari penulisan penelitian ini.

#### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini juga akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa desk research yang disertai dengan adanya dukungan studi Pustaka. Menurut Hague, studi pustaka merupakan salah satu Teknik pengumpulan data tanpa perlu turun

langsung ke lapangan dan memanfaatkan data-data yang sudah ada di penelitian sebelumnya (Hague, 2006). Untuk mengumpulkan data pendukung hipotesis, penulis akan menggunakan metode decontextualization. Menurut Mannheim, metode ini menggunakan kode atau label untuk memudahkan klasifikasi data yang sudah terkumpul (Mannheimer, Pienta, & Kirilova, 2018). Setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, penulis akan berusaha memilah data yang dibutuhkan dan dirasa paling cocok dengan konsep penelitian. Data yang telah disortir ini kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Jawaban akan didapatkan setelah data-data berhasil dianalisis menggunakan pisau analisis yang telah dipilih oleh penulis yakni *process-tracing*. Metode ini biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat deskriptif-eksplanatif yang bertujuan untuk melacak hubungan sebab-akibat dari variabel yang saling berhubungan satu sama lain berdasarkan urutan yang logis (Rosyidin, 2016).

#### **1.9.6 Teknik Analisis Interpretasi Data**

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif eksplanatif, dengan ciri khas pertanyaan ‘mengapa sesuatu bisa terjadi?’, berbeda dengan metode kualitatif deskriptif yang cenderung akan bertanya ‘apa yang terjadi?’ (Prajitno, 2013). Melalui metode kualitatif eksplanatif, akan dilakukan pencarian kausalitas dalam proses analisis dan interpretasi datanya. Dengan pencarian kausalitas, diharapkan dapat terungkap sebab-akibat dari fenomena yang dianggap menarik oleh peneliti. Sebab akibat nanti diketahui ketika fenomena (a) dipengaruhi oleh suatu faktor lain, yakni faktor (b). Salah satu ciri khas dari metode kualitatif eksplanatif ini adalah dengan adanya proses pengumpulan data-data

setelah fenomena itu terjadi yang kemudian dikaji menggunakan variabel tertentu untuk menemukan keterkaitan sebab akibatnya (Isaac & Michel,1982)

### **1.9.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab yang akan dijabarkan di bawah ini:

1. Bab I: Pada Bab I ini akan membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah yang ditawarkan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, dan juga metode penelitian.
2. Bab II: Pada Bab II akan berisi pembahasan mengenai fenomena konsistensi bantuan Jerman terhadap Palestina selama 10 tahun.
3. Bab III: Pada Bab III akan berisi analisis hubungan dari fenomena konsistensi bantuan Jerman terhadap Palestina selama 10 tahun dengan prinsip *utility* yang ada pada teori utilitarianisme.
4. Bab IV: Pada Bab IV akan berisi penutup dan kesimpulan dan pemberian saran-saran ditujukan untuk penelitian berikutnya.

### **1.9.8 Kualitas Data**

Untuk memperoleh kualitas data yang baik yang memenuhi karakteristik data yang kredibel dan akurat, maka peneliti menggunakan sumber-sumber data yang memiliki kualitas baik dan kredibel. Untuk mendapatkan kualitas data yang baik maka penulis mencari data dari sumber primer dan sekunder yang terpercaya. Untuk data primer seperti hasil wawancara jarak jauh yang dilakukan oleh media informasi (pers) terhadap subjek terkait, untuk menjamin kualitas data yang baik maka penulis akan melakukan penelitian dengan hasil wawancara yang dilakukan



oleh kanal berita yang memang memiliki pengetahuan yang cukup tentang isu yang diangkat pada penelitian ini dan juga dapat dipercaya. Untuk data sekunder maka penulis akan mencari data tersebut dari situs-situs.